

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP ini digunakan oleh pemerintah kabupaten kupang dapat memberikan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca serta pencatatan transaksi atau juga pada saat kejadian atau kondisi keuangan pemerintah yang tertera dalam PP No.71 Tahun 2010.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan sebabnya kompetensi aparatur pada pemerintah kabupaten kupang bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena kualitas laporan keuangan memiliki kriteria antara lain, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan dimana peran audit internal tersebut menggambarkan kunci dalam unit pemerintah kabupaten Kupang yang memiliki keahlian untuk menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan dengan mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan dalam anggaran serta untuk membuat rekomendasi agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas laporan keuangan

5.2. Implikasi Teoritis

Berikut ini beberapa point dalam implikasi teoritis yang diambil peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tolak ukur kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan (Defitri, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan. Standar akuntansi pemerintah menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan

termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. (Sinaga 2015)

2. Kompetensi aparatur penata laporan keuangan daerah (SDM) digambarkan sebagai kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001). Standar kompetensi mengandung empat komponen pokok, yaitu pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain, sehingga aparatur dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (Suprpto, 2002).
3. Audit internal sebagai suatu mekanisme atau cara dalam mengatasi potensi terjadinya resiko yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Menurut Ardeno Kurniawan (2015) menjelaskan audit internal adalah aktivitas penjamin yang independen dan objektif, juga suatu jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi pemerintahan. Audit internal akan membantu pemerintahan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko dan efisiensi serta ekonomisasi di dalam aktifitas roda pemerintahan.

5.3. Implikasi Terapan

Berikut ini beberapa point dalam implikasi terapan yang diambil peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten kupang diharapkan dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menjadikan kabupaten kupang sebagai daerah yang transparansi, bebas dari KKN demi kesejahteraan masyarakat pada kabupaten kupang lebih merata.
2. Kompetensi aparatur pemerintahan kabupaten kupang wajib mempertahankan kondisi pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga aparatur dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien
3. Pemerintah kabupaten kupang wajib memperhatikan peran audit internal sebab peran audit internal sangat penting sebagai sumber informasi yang independen mengenai berbagai aktivitas pemerintahan dalam hal ini kualitas laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang obyektif dan accountable.